



Journalist : -

Tonality : Positive

News Value : 2,250,000

Ads Value : 750,000

Topic :

Senin, 16 Oktober 2023 14:41 WIB



1074

Mendag Zulkifli Hasan juga menyebutkan, ke depan, Kemendag akan mengatur tata kelola ekspor CPO yang akan memfasilitasi pelaku usaha melalui Bursa Berjangka oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menyampaikan, pada 9 Oktober 2023, Bappebti telah menerbitkan persetujuan Bursa CPO kepada PT Bursa Komoditi dan Derivat Indonesia atau yang dikenal dengan PT Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BCPO/10/2023.

"Pembentukan Bursa CPO ini adalah bukti pemerintah hadir dalam upaya mendorong perdagangan CPO lokal yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian berusaha dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat. Kesempatan ini merupakan momen yang baik karena menjadi sarana edukasi pemerintah kepada masyarakat bahwa komoditas unggulan kita yaitu CPO harus lebih didorong agar menjadi tuan di rumah sendiri," ujar Didid.

Didid mengungkapkan, perdagangan CPO melalui Bursa Berjangka Indonesia ini bersifat sukarela. "Meskipun bersifat sukarela, namun kami yakin seluruh pelaku usaha bersedia berpartisipasi dalam upaya menegakkan marwah CPO di bumi Nusantara. Kami juga mendorong UMKM pengusaha pabrik kelapa sawit ikut serta dalam Bursa CPO Indonesia ini. Hal ini karena perdagangan di bursa akan menempatkan penjual dan pembeli pada tingkat yang sama (same level playing field) serta memiliki kekuatan tawar yang sama karena perdagangan melalui bursa akan mempertemukan penjual dengan pembeli," kata Didid.

Didid juga menjelaskan, untuk mengotimalkan perdagangan CPO di Bursa Berjangka karena ini bersifat sukarela, perlu dilakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan terkait mekanisme perdagangan di bursa. "Sosialisasi dan pelatihan ini akan dilakukan bukan saja kepada pemain besar, namun juga pemilik pabrik kelapa sawit," ungkap Didid.

Menurut Didid, saat ini sudah bergabung 18 pelaku usaha CPO yang siap untuk berdagang melalui Bursa CPO Indonesia. "Ini tentunya menjadi langkah awal yang baik. Bursa ini tidak mulai dari nol. Hal ini juga menunjukkan bahwa sudah ada keinginan kuat dari pelaku usaha untuk mewujudkan perdagangan CPO lebih adil dan transparan," jelasnya.

Didid juga menargetkan Bursa CPO sudah bisa live pada 23 Oktober 2023. Artinya perdagangan CPO melalui Bursa Berjangka sudah terjadi secara efektif. Dengan demikian, mulai 23 Oktober 2023 nanti, sudah mulai terbentuk price discovery dan dengan upaya untuk meningkatkan kredibilitas bursa. Diharapkan pada triwulan pertama 2024 sudah mampu mewujudkan price reference.

"Pendirian bursa CPO ini sekaligus menandai transformasi Bappebti. Ke depan, Bappebti akan lebih fokus pada pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah CPO ini, Bappebti akan meneruskan dengan komoditi strategis lainnya seperti kopi, karet, kakao, dan sebagainya," urai Didid.

Direktur Utama Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Nursalam mengatakan, penunjukan pemerintah kepada ICDX untuk menjadi penyelenggara Pasar Fisik CPO melalui Bursa ini tentunya adalah sebuah kepercayaan besar dari pemerintah. ICDX sebagai kepanjangan tangan pemerintah akan mewujudkan pasar CPO yang teratur, wajar, dan efisien. Selain itu, ICDX juga berkomitmen menjadi bursa yang inklusif dan menyediakan kesetaraan bagi semua pelaku pasar.

"Sudah menjadi kewajiban ICDX untuk mewujudkan Bursa CPO sebagai bursa yang kredibel, mandiri, dan transparan. Secara teknis, kami telah siap untuk penyelenggaraan pasar fisik CPO ini termasuk dalam hal sistem perdagangan. Kesuksesan Bursa CPO tentunya akan menjadi kesuksesan negara sebagai produsen CPO terbesar di dunia dalam mewujudkan harga acuan CPO dunia. Ke depan, ICDX akan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bisa berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem ini," ujar Nursalam. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan diskusi panel dengan narasumber Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita, Akademisi Bustanul Arifin, dan Direktur ICDX Yogieandy Tirta Saputra.

Olvy menegaskan, pembentukan Bursa CPO ini bukanlah akhir, namun awal dari langkah mewujudkan mimpi Indonesia yaitu memiliki harga acuan CPO sendiri. Masih banyak proses yang akan dilakukan dan masih butuh banyak masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan perdagangan CPO melalui bursa ke depan. "Harapannya, keberadaan bursa CPO ini tidak memberatkan pelaku usaha sehingga akan banyak yang berpartisipasi ke dalam bursa. Selain itu, kolaborasi antar-kementerian dan lembaga juga harus dikuatkan mengingat efektifnya perdagangan CPO melalui bursa dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dari kementerian dan lembaga lain yang terkait," imbuh Olvy.

Dari sisi akademisi, peluncuran Bursa CPO adalah sinyal positif bagi perbaikan tata kelola perdagangan CPO Indonesia. "Idealnya memang pasar fisik CPO berjalan berbarengan dengan berjangka. Namun inisiatif pemerintah ini patut kita apresiasi karena selain perbaikan data nilai dan volume CPO, dengan transaksi di bursa diharapkan tercipta 'value' CPO yang sesungguhnya. Hal yang tidak kalah penting, bagaimana bursa harus membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat," jelas Bustanul.

Sementara itu Direktur ICDX Yogieandy Tirta Saputra menyampaikan, komitmen ICDX dalam mengemban amanah sebagai Bursa CPO Indonesia. "Dengan semangat berkontribusi kepada bangsa dan negara, ICDX selalu mengedepankan prinsip kredibilitas, transparansi, dan trusted dalam melayani member. ICDX optimis dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, Bursa CPO dapat memberikan dampak yang signifikan dalam perbaikan tata kelola perdagangan CPO Indonesia dan mencapai tujuan utama pembentukan harga acuan yang dicita-citakan bersama," kata Yugi.